

BUKU I RINGKASAN EKSEKUTIF



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan tantangan global yang tidak terhindarkan dan sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, termasuk penyediaan informasi lingkungan yang terbuka dan dapat diakses publik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Cimahi menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu dan transparan.

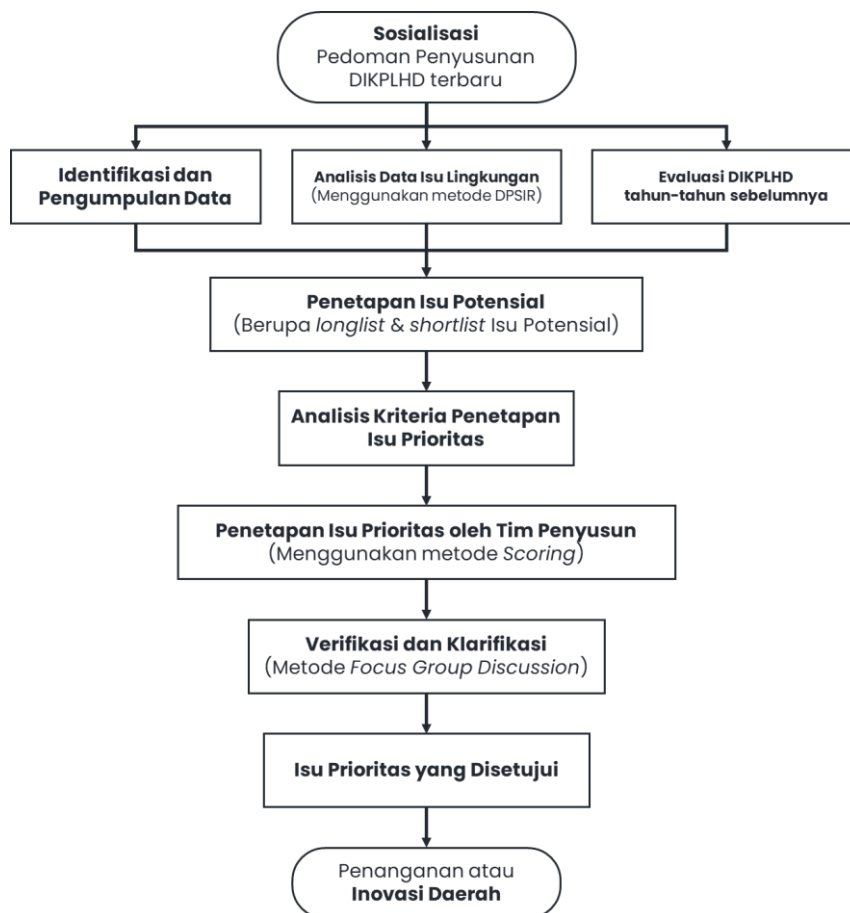
DIKPLHD Kota Cimahi disusun sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat, dengan menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, Response*) untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih terarah, efektif, dan partisipatif.

1.2 Gambaran Singkat Proses Penyusunan DIKPLHD Tahun 2025

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi dilakukan oleh tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Cimahi yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah (PD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Sedangkan pembentukan tim penyusun

DIKPLHD keanggotaannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi.

Tugas tim penyusun meliputi menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force-Pressure-State-Response* (DPSIR), mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi tahun 2025. Langkah-langkah penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Diagram Alir Penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Cimahi Tahun 2025

II. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE*

2.1 Tata Guna Lahan

Tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Adapun *framework* (kerangka kerja) analisis DPSIR isu tata guna lahan dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 *Framework* DPSIR Isu Tata Guna Lahan

2.1.1 *Driving Force*

a) Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi

Jumlah penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 581.994 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6.475 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai 1,13%.

b) Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cimahi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan,

termasuk di Kota Cimahi. Kota Cimahi mengalami peningkatan nilai ekonomi yang signifikan dari Rp24.652,72 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp27.296,93 miliar pada tahun 2024 (BPS Kota Cimahi, 2024).

2.1.2 Pressure

a) Konversi Lahan di Kota Cimahi

Pada tahun 2018, luas lahan industri berada pada kisaran 500 hektar. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana luas lahan industri meningkat hingga sekitar 530 hektar. Penggunaan lahan untuk permukiman menunjukkan pada tahun 2017, tercatat sekitar 1.977 hektar. Pada tahun 2024, luas lahan permukiman mencapai lebih dari 2.900 hektar.

b) Pembangunan Infrastruktur

Luas lahan yang digunakan untuk jalan arteri primer dan jalan tol mencapai hampir 35 hektar. Sementara itu, lahan-lahan alami seperti sawah (sekitar 320 ha), tanah kosong, semak belukar, dan perkebunan masing-masing berada pada kisaran 130–180 hektar.

2.1.3 State

a) Perubahan Tata Guna Lahan di Kota Cimahi

Lahan non-pertanian pada tahun 2023 tercatat mencapai 3.845,54 Ha, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 3.568 Ha.

b) Fragmentasi Habitat

Kondisi lahan saat ini tidak terlepas dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung termasuk dalam zonasi perlindungan dalam dokumen RPPLHD Kota Cimahi, yaitu daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal.

c) Hilangnya Lahan Terbuka

Di Kota Cimahi sendiri tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan, sehingga Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Luas hutan kota di Kota Cimahi sebesar 237,12 Ha yang terletak di beberapa lokasi.

2.1.4 Impact

a) Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Ekosistem daratan sangat mempengaruhi kondisi keragaman biota di Kota Cimahi. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup didalamnya. Hilangnya habitat alami mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna endemik di Kota Cimahi.

b) Timbulnya Risiko Bencana

Perubahan tata guna lahan yang tidak terencana dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Pada tahun 2024, kejadian bencana di Kota Cimahi tercatat sebanyak 8 kejadian.

c) Perubahan Iklim Lokal

Urban heat island akibat dominasi lahan terbangun memperkuat efek suhu tinggi di kawasan permukiman padat. Peningkatan pembangunan menyebabkan perubahan area yang sebelumnya ditutupi oleh vegetasi dengan beton dan aspal yang memiliki kapasitas penyerapan panas lebih tinggi dan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu lokal.

2.1.5 Response

Response untuk Driver:

1. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan
2. Promosi Investasi Kota Cimahi (Si Tampan)
3. *Biodiversity by design*

Response untuk Pressure:

1. Pengawasan pembangunan

2. *Biodiversity by design*

Response untuk State:

1. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan
2. Pengawasan Pembangunan
3. Pelestarian Habitat

Response untuk Impact:

1. Penghijauan dan Pengoptimalan RTH
2. Pelestarian dan Restorasi Habitat

2.2 Kualitas dan Kuantitas Air

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. *Framework* atau kerangka kerja analisis isu kualitas air dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3 Framework DPSIR Isu Kualitas Air

2.2.1 *Driving Force*

a) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan konsumsi air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, maupun sosial. Seiring dengan itu, volume air limbah domestik juga meningkat.

b) Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi

Pemantauan curah hujan di Kota Cimahi sepanjang tahun 2024 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif, dengan intensitas tertinggi pada bulan April sebesar 67 mm dan terendah pada bulan Agustus hanya sebesar 5 mm.

c) Kondisi Geografis Kota Cimahi

Kota Cimahi diproyeksikan memiliki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m³ per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m³ dan air tanah sebesar 13,612 juta m³.

d) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri

2.2.2 *Pressure*

a) Kepadatan Penduduk

Tingginya konsentrasi penduduk di wilayah tertentu, terutama di Cimahi Tengah, berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga, sanitasi, dan layanan publik lainnya. Dalam konteks ini, permintaan terhadap air tidak hanya meningkat, tetapi juga berpotensi menghasilkan volume limbah domestik yang besar.

b) Daya Tampung Beban Pencemar Sungai

Kota Cimahi memiliki beberapa sungai yang bermuara pada Sungai Citarum, diantaranya adalah Sungai Cibaligo, Cimahi, Cisangkan, Cibeureum dan Cilember. Daya tampung beban pencemaran DAS Citarum sudah melewati batas, Kota Cimahi berkontribusi mencemari DAS Citarum sebesar 10 persen dari total beban pencemaran.

c) Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak memadai

Rumah tangga (RT) di Kota Cimahi paling banyak memakai fasilitas tempat buang air besar milik sendiri yaitu sebanyak 90.057 KK, sedangkan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama sebanyak 2.965 KK, dan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar umum sebanyak 2.730 KK, serta masih ada RT yang buang air besar sembarangan. Sedangkan jumlah RT yang

masih membuang air besar sembarangan (ke sungai) berada di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah.

d) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan berkontribusi pada rendahnya kepemilikan fasilitas MCK sehat, keterbatasan untuk membangun sistem septik individu, serta rendahnya partisipasi dalam layanan pengelolaan air limbah.

e) Kontribusi Volume Limbah Non Domestik

Volume limbah non domestik di Kota Cimahi yang terdata pada tahun 2024 jumlah limbah padat B3 sebesar 36.236,1 ton/tahun sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan menimbulkan 217 ton/tahun, dan laboratorium lingkungan menimbulkan 2 ton/tahun.

f) Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

Potensi sumber daya air Provinsi Jawa Barat adalah 66.256 juta m³ per tahunnya, yaitu air permukaan sekitar 42.821 juta m³/tahun dan sekitar 23.435 juta m³/tahun untuk air tanah (RPPLH Kota Cimahi, 2017). Kebutuhan paling tinggi yaitu sebesar >50 ribu m³/tahun. Atas dasar kebutuhan ini, Kota Cimahi mengalami tekanan terkait ketersediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

2.2.3 *State*

a) Kualitas Air Danau/waduk/situ/embung

Pemantauan kualitas air danau/waduk/situ/embung di Kota Cimahi dilakukan pada bulan Februari, dengan 6 lokasi titik pantau. Lokasi pemantauan kualitas air danau di Embung Brigif, Embung Cibabat, Embung Ciseupan, Kolam Retensi Pasirkaliki, Embung Pemkot, dan Embung Setiamanah. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi parameter TSS, BOD, COD, *Total Coliform*, *Fecal Coliform*, minyak dan lemak tidak memenuhi baku mutu, sedangkan TDS, dan DO masih ada beberapa titik yang memenuhi baku mutu kualitas air danau berdasarkan PP 22 tahun 2021 Lampiran VI.

b) Kualitas Air Sungai

emantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Februari, Bulan Juni dan Bulan September untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Analisis tingginya parameter *Total Suspended Solid* (TSS) disebabkan oleh adanya buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, serta kehadiran zat padat di dalam badan air juga dapat disebabkan oleh adanya kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa oleh air. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bahwa konsentrasi TSS pada air sungai di Kota Cimahi terdapat 18 titik yang melebihi baku mutu. Data BOD biasanya dipergunakan untuk mengetahui besaran limbah yang perlu diolah secara biologis, dan untuk melihat potensi perubahan maksimum pada BOD sungai yang akan menerima buangan air limbah/cemaran. Berdasarkan data pemantauan, konsentrasi BOD pada anak sungai di Kota Cimahi tidak ada yang memenuhi baku mutu. Parameter COD merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis, menjadi karbon dioksida dan air. Sama halnya dengan parameter BOD, konsentrasi COD pada anak-anak sungai di Kota Cimahi masih belum menunjukkan pengendalian pencemaran yang optimal. Nilai konsentrasi COD paling tinggi berada di Sungai Cibeureum bagian Hilir yang mencapai nilai 325 mg/L. Bakteri *coliform* total meliputi semua jenis bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. Potensi pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, sehingga konsentrasi *fecal coliform* terlampaui tinggi.

c) Status Mutu Air

Penilaian status mutu air untuk setiap sungai di 3 titik pantau (hulu, tengah, hilir) dengan 3 periode pemantauan. Hasil pemantauan kelima sungai di Kota Cimahi menunjukkan jumlah titik pantau Cemar Berat sebanyak 0 titik, Cemar Sedang sebanyak 7 titik, dan Cemar Ringan sebanyak 38 titik.

d) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air Kota Cimahi tahun 2024 dihitung berdasarkan persentase jumlah titik pantau tiap status mutu terhadap total data terpantau. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024 indeks kualitas air sungai di Kota Cimahi bernilai 46,89 Nilai IKA jika dihitung menggunakan metode yang sama, nilainya masih termasuk ke dalam klasifikasi buruk.

e) Kualitas Air Hujan

Pemerintah Kota Cimahi juga melakukan pemantauan pada kualitas air hujan di 4 (empat) titik pemantauan, yaitu industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi. Rendahnya nilai pH dapat mengindikasikan terjadinya hujan asam, hal ini diikuti dengan kualitas SO_4 dan NO_3 yang tinggi di titik pantau industri.

f) Kualitas Air Sumur

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama yaitu di Bulan Mei. Pengujian kualitas air sumur dalam analisis ini dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Hasil pengujian parameter NO_3 sebagai N menunjukkan terdapat 22 titik sampel tidak memenuhi baku mutu. Konsentrasi Nitrat yang paling tinggi berada di titik pantau air sumur RT01/RW01 Kelurahan Cibeber. Hasil pengujian parameter Besi pada kualitas air sumur di Kota Cimahi menunjukkan terdapat 2 titik yang melebihi baku mutu dengan nilai konsentrasi paling tinggi di Kelurahan Setiamanah RT01/RW17. Nilai konsentrasi Mangan paling tinggi terdapat di RT02/RW08 Kelurahan Cigugur Tengah. Parameter *Fecal Coliform*

pada kualitas air sumur juga diuji. Dari 30 titik sampel yang diuji, semua titik memiliki nilai *fecal coliform* yang melebihi baku mutu.

2.2.4 Impact

a)

b) Penyakit yang Diderita Masyarakat

Di Kota Cimahi, pada tahun 2024, jumlah penderita penyakit pencernaan tercatat sebanyak 6.109 orang (25,99%), sebuah penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 18.435 penderita pada tahun 2023.

c) Sumber Air Minum/Air Bersih

Sumur tetap menjadi sumber utama air minum bagi masyarakat Kota Cimahi, dengan jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumur. Ketergantungan pada sumur menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada air tanah sebagai sumber utama.

d) Penurunan Muka Air Tanah

Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra berbagai kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Potensi pemanfaatan air di Kota Cimahi berasal dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi).

e) Pengaduan Masyarakat

Pada tahun 2024, terdapat pengaduan terkait kualitas air yaitu adanya pencemaran air limbah industri, pencemaran air sumur, pencemaran air limbah domestik, dan air sungai.

2.2.5 Response

Response untuk Driver:

1. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur Berkala
2. Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Response untuk Pressure:

1. Pengadaan Sumur Resapan

Response untuk State:

1. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran

Response untuk Impact:

1. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

2.3 Kualitas Udara

Pertumbuhan industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi peningkatan emisi yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Kerangka kerja analisis DPSIR Kota Cimahi terhadap isu kualitas udara dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4 Framework DPSIR Isu Kualitas Udara

2.3.1 *Driving Force*

a) Pertumbuhan Industri

Jumlah perusahaan di Kota Cimahi mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Tahun 2024 sedikit menurun namun tetap tinggi, sekitar 109 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan ini menjadi *driving force* terhadap peningkatan aktivitas

industri di wilayah tersebut, yang berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan kualitas udara.

b) Transportasi

Jumlah sepeda motor yang mendominasi (lebih dari 32 ribu unit) berpotensi besar memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran udara, terutama pada jam-jam sibuk dan di kawasan padat lalu lintas.

2.3.2 Pressure

a) Emisi Gas dan Partikel

Di Kota Cimahi terdapat beberapa industri menggunakan bahan bakar berupa Batubara, Gas LPG, dan Solar (BPS Kota Cimahi, 2023). Penggunaan bahan bakar tersebut dapat meningkatkan konsentrasi pencemar udara.

b) Polusi Udara Lokal

2.3.3 State

a) Konsentrasi Polutan Udara

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan metode *passive sampling* dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kualitas udara di Kota Cimahi dilakukan pada perkantoran (Kantor di Kelurahan Cigugur Tengah), perumahan (Perumahan Pilar Mas), transportasi (PT Logam Bima), dan industri (PT Jenshiang Nusantara).

b) Kualitas Udara Ambien (ISPU)

Pada pengukuran kualitas udara ambien, baku mutu yang digunakan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dari perhitungan ISPU diperoleh bahwa kategori Tidak Sehat terjadi di Transportasi dengan nilai ISPU pada parameter PM_{2,5} mencapai 101,83.

2.3.4 Impact

a) Kesehatan Masyarakat

Kualitas udara memberikan dampak terhadap manusia, dampak dari penurunan kualitas udara adalah terkait kesehatan masyarakat. Salah satunya menyebabkan penyakit saluran pernapasan sebesar 5,56% atau sebanyak 1.308 penderita.

b) Kerusakan Lingkungan

2.3.5 Response

Response untuk Driver:

1. Regulasi Pemerintah
2. Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Response untuk Pressure:

1. *Car Free Day*
2. Uji Emisi Kendaraan

Response untuk State:

1. Pemantauan Kualitas Udara

Response untuk Impact:

1. Kegiatan *Earth Hour* sebagai upaya kampanye penghematan energi

2.4 Risiko Bencana

Kerangka kerja analisis DPSIR Isu Risiko Bencana dapat dilihat pada

Gambar 5.



Gambar 5 Framework DPSIR Isu Risiko Bencana

2.4.1 *Driving Force*

- a) Letak Geografis Kota Cimahi
- b) Pertumbuhan Penduduk dan Perkotaan
- c) Perubahan Iklim

2.4.2 *Pressure*

- a) Kerentanan Infrastruktur
- b) Kerentanan Sosial dan Ekonomi
- c) Kerentanan Lingkungan

2.4.3 *State*

- a) Frekuensi dan Intensitas Bencana

Selama tahun 2024, Kota Cimahi dilanda bencana beberapa bencana. Adapun bencana yang terjadi di Kota Cimahi yaitu bencana kebakaran, banjir, angin kencang, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Tercatat sebanyak 8 kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi.

- b) Kerusakan Infrastruktur dan Properti

Kota Cimahi sering menghadapi berbagai bencana alam yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan properti. Selama tahun 2024, perkiraan kerugian akibat bencana mencapai ±Rp176.000.000,00.

2.4.4 *Impact*

- a) Dampak Sosial

Kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2024 menyebabkan sebanyak 74 korban mengungsi.

- b) Kerugian Ekonomi

2.4.5 *Response*

Response untuk Driver:

1. Mitigasi Bencana

Response untuk Pressure:

1. Penghijauan
2. Pengadaan Sumur Resapan

Response untuk State:

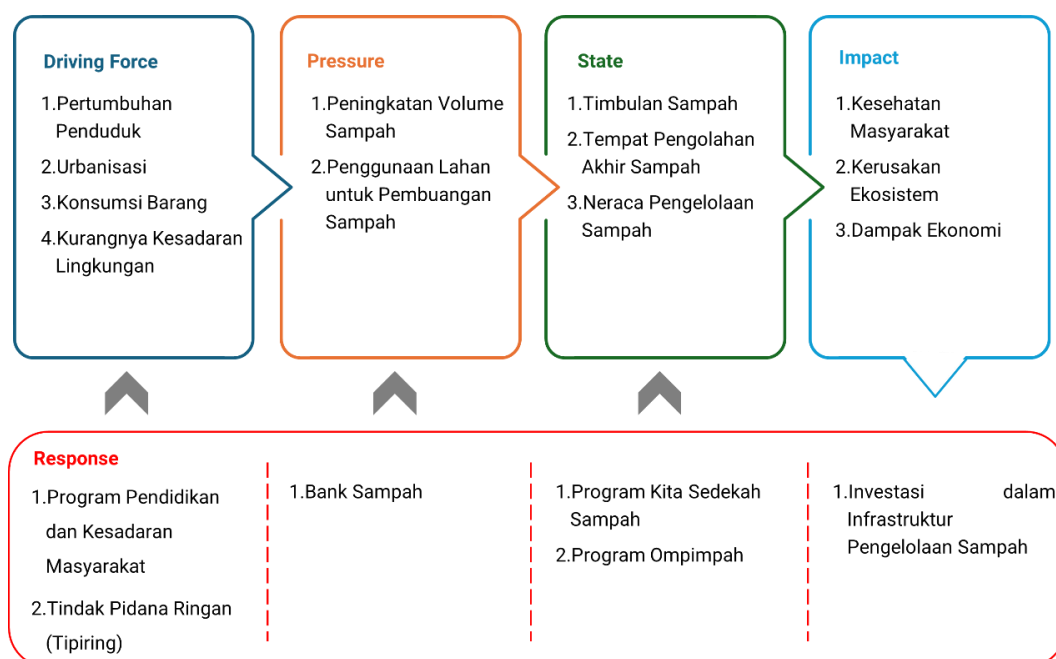
1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Sistem Informasi Bencana Daerah

Response untuk Impact:

1. Rukun Warga Tangguh Bencana

2.5 Perkotaan/Persampahan

Kerangka kerja analisis DPSIR isu perkotaan/persampahan dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Gambar 6 Framework DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan

2.5.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Urbanisasi
- c) Konsumsi Barang

Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari perilaku konsumsi dan pembuangan sampah yang tidak tepat.

- d) Kurangnya Kesadaran Lingkungan

Di seluruh kecamatan di Kota Cimahi, mayoritas penduduk masih berada pada kategori pendidikan rendah, yakni tidak sekolah, belum tamat SD/ sederajat dan lulusan SD-SLTA. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan, dengan lebih dari 140.000 penduduk berpendidikan SD-SLTA dan lebih dari 80.000 yang belum tamat SD atau tidak sekolah.

2.5.2 Pressure

a) Peningkatan Volume Sampah

Pada tahun 2023, timbunan sampah di Kota Cimahi diperkirakan sebesar 1.433,04 m³/hari dan meningkat menjadi 1.449,17 m³/hari pada tahun 2024.

b) Penggunaan Lahan untuk Pembuangan Sampah

Ketika lahan yang tersedia untuk pembuangan sampah semakin berkurang, maka akan sulit untuk menemukan tempat yang aman dan sesuai.

2.5.3 State

a) Timbunan Sampah Kota Cimahi

Timbunan sampah pada tahun 2024 mencapai 1.449,17 m³ per hari dan akan terus meningkat. Sebagian besar sampah ditimbulkan dari Kecamatan Cimahi Selatan.

b) Tempat Pengolahan Akhir Sampah

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi.

c) Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

Pada tahun 2022, jumlah timbunan sampah yang tercatat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi sebanyak 100.542,32 ton/tahun. Jumlah sampah yang dikelola sebesar 77,09% atau 77.503,88 ton/tahun dan jumlah sampah tidak terkelola mencapai 22,91% atau 23.038,44 ton/tahun.

2.5.4 Impact

a) Kesehatan Masyarakat

Penyakit yang dapat disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik dapat berupa penyakit langsung seperti virus dan bakteri yang ditularkan langsung dari kontak antara sampah dan masyarakat, penyakit tidak langsung dapat ditularkan melalui vektor perantara seperti serangga maupun hewan. Penyakit pada sistem pencernaan merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi di Kota Cimahi, yaitu sebesar 25,99%. Hal ini diikuti oleh penyakit pada sistem muskuloskeletal (8,41%), cedera dan keracunan (9,03%), gangguan mental dan perilaku (7,23%), serta penyakit sistem pernapasan (5,56%).

b) Kerusakan Ekosistem

2.5.5 *Response*

Response untuk Driver:

1. Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
2. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Response untuk Pressure:

1. Bank Sampah

Response untuk State:

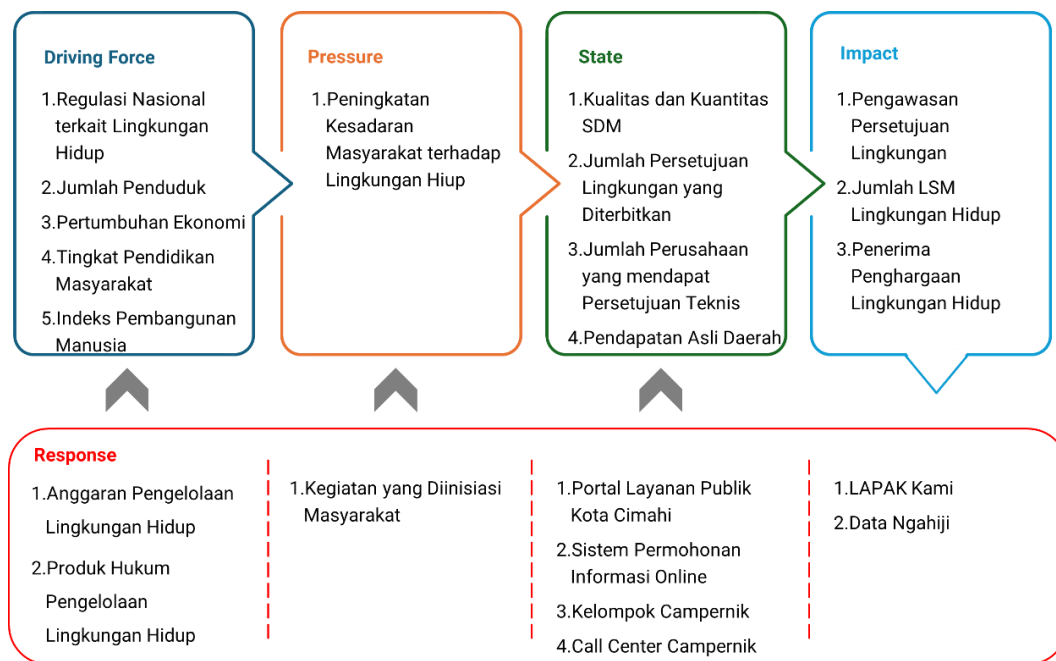
1. Program Kita Sedekah Sampah
2. Program Ompimpah

Response untuk Impact:

1. Investasi dalam Infrastruktur Pengelolaan Sampah

2.6 **Tata Kelola**

Pada skala perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja analisis DPSIR isu tata kelola dapat dilihat pada **Gambar 7**.



Gambar 7 Framework DPSIR Isu Tata Kelola

2.6.1 *Driving Force*

- Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup
- Jumlah Penduduk Kota Cimahi
- Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku, Kota Cimahi mengalami peningkatan nilai ekonomi yang signifikan dari Rp24.652,72 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp27.296,93 miliar pada tahun 2024 (BPS Kota Cimahi, 2024). Peningkatan PDRB Kota Cimahi yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan dorongan kuat terhadap pengembangan tata kelola yang lebih baik.

- Tingkat Pendidikan Masyarakat
- Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Kota Cimahi memiliki nilai IPM dalam kategori baik (80,3) diatas nilai IPM Provinsi Jawa Barat (74,92). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi dari tahun 2019 hingga 2024 mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per

kapita. Data menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan IPM, terdapat dampak positif terhadap tata kelola di Kota Cimahi, yang dapat mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

2.6.2 Pressure

- a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup
Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tahun 2024, terdapat 24 pengaduan yang diterima oleh pemerintah Kota Cimahi, dan telah diselesaikan. Pengaduan yang selesai menunjukkan peningkatan fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

2.6.3 State

- a) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjang dengan sumber daya manusia atau personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pada tahun 2024, jumlah personil yang terikat dengan lembaga pengelola lingkungan hidup yaitu 97 orang.
- b) Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan
Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan 9 dokumen persetujuan lingkungan berupa AMDAL sebanyak 1 dokumen, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebanyak 6 dokumen dan Revisi UKL-UPL sebanyak 1 dokumen.
- c) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi di tahun 2024 adalah Rp515.643.413.564,00 namun jumlah ini belum ditambahkan dengan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2024 karena belum dilakukan pendataan. Besaran anggaran pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh besaran PAD suatu daerah.

2.6.4 Impact

a) Pengawasan Persetujuan Lingkungan

b) Jumlah LSM Bidang Lingkungan Hidup

LSM berperan sebagai jembatan penghubung masyarakat terhadap pemerintah serta memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah. Di Kota Cimahi selama tahun 2024 tercatat sebanyak 15 (tujuh) LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

c) Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2024, Kota Cimahi telah memberikan penghargaan lingkungan hidup berupa PROPER kepada badan usaha sejumlah 22 unit, diantaranya PROPER BIRU 12 perusahaan dan PROPER MERAH 10 perusahaan.

2.6.5 Response

Response untuk Driver:

1. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Produk Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Response untuk Pressure:

1. Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat

Response untuk State:

1. Portal Layanan Publik Kota Cimahi
2. Sistem Permohonan Informasi Online
3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Campernik
4. Call Center Cimahi Campernik (C4)

Response untuk Impact:

1. LAPAK Kami
2. Data Ngahiji

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Penetapan isu prioritas dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD), diawali dengan paparan materi kepada para *stakeholders* di Kota Cimahi

dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masukan dan saran para *stakeholder* menjadi respons baik bagi tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2025. Penetapan isu prioritas dilakukan dengan pengisian formulir secara *online* (dalam jaringan) menggunakan *spreadsheet*. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh bahwa 4 (empat) isu dengan nilai paling tinggi disetujui menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Berikut daftar isu prioritas di Kota Cimahi yang telah disepakati:

1. Pengelolaan Sampah
2. Kualitas dan Kuantitas Air
3. Alih Fungsi dan Keterbatasan Lahan
4. Kualitas Udara

IV. INOVASI DAERAH

Berdasarkan S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tentang perdoman DIKPLHD Tahun 2024, Inovasi Daerah adalah Inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada periode penilaian. Adapun kriteria perumusan inovasi daerah mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah
2. Peningkatan Kapasitas Personil
3. Pengembangan Jejaring Kerja
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kepada Publik
5. Inisiatif atau Kegiatan yang Dikembangkan oleh Masyarakat

4.1 AWAS SI KOMA

Inovasi Awas Si Koma (Kawasan Pengelolaan Sampah Menuju Sirkular Ekonomi Mandiri) adalah inovasi unggulan Pemerintah Kota Cimahi yang bertujuan mengatasi permasalahan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular. Inovasi ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan

sampah, mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan daerah. Program Awas Si Koma ditopang oleh dua program utama, yaitu budidaya maggot dan Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (OMPIMPAH). Keduanya menjadi pilar penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan ekonomi sirkular.

- Budidaya Maggot: Menggunakan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) untuk mengolah sampah organik. Selain efektif mengurangi volume sampah organik, maggot juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, khususnya lele. Setiap bulan, RW 18 mampu menghasilkan sekitar 100 kg lele segar, yang sebagian dibagikan gratis kepada warga dan sebagian lagi diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Maggot yang telah dipanen juga dapat dijadikan pupuk organik atau dijual kembali sebagai pakan ikan, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
- Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (OMPIMPAH): Mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya guna mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam program ini, dipilih empat kader dari masing-masing RW untuk melaksanakan door to door education (DTDE), yaitu edukasi langsung kepada masyarakat dari rumah ke rumah terkait pentingnya memilah sampah. Setelah edukasi, dilanjutkan dengan door to door collection (DTDC), yakni kegiatan pengumpulan dan pengecekan sampah terpilah dari rumah-rumah yang telah diedukasi. DTDC dilakukan berulang sampai warga benar-benar menerapkan pemilahan sampah.

Sampai saat ini Awas Sikoma dapat mengolah sampah makanan sebanyak 17 ton/bulan dari 6.166,68 ton/tahun. Selain mengurangi sampah makanan dengan budidaya maggot dan budidaya lele, Awas Sikoma berkontribusi dalam capaian pembangunan diantaranya Pencegahan stunting lewat produk-produk bernilai gizi tinggi (budidaya lele), penerapan

ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan ekonomi local pada sektor UMKM, pertanian dan perikanan, serta penerapan sirkular ekonomi.



Gambar 8 Framework DPSIR Isu Tata Kelola

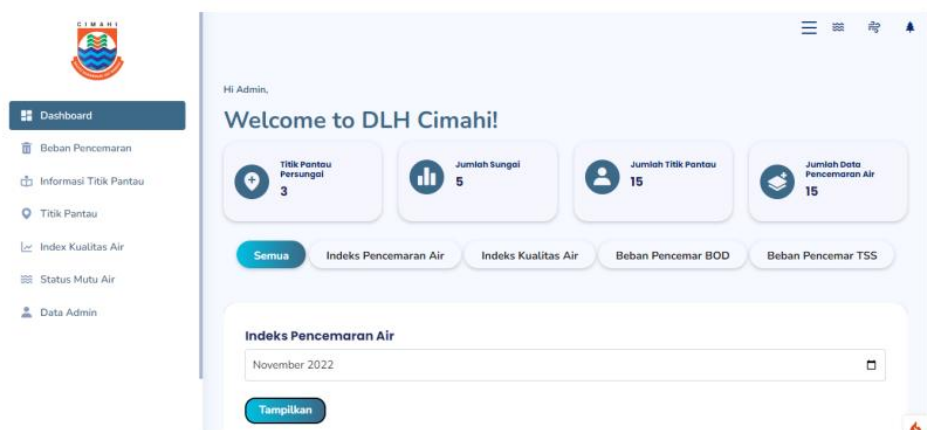
4.2 SITANGAN

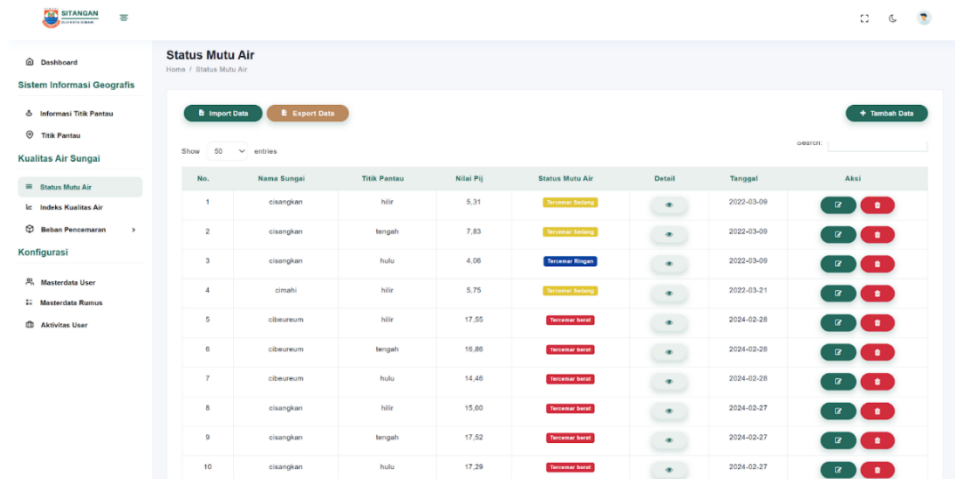
Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup (Sitangan) untuk kualitas air menampilkan beberapa komponen. Data kualitas air dapat diinput ke dalam sistem dan dihitung secara otomatis. Komponen yang muncul dalam SITANGAN diantaranya:

1. Status Mutu Air
2. Indeks Kualitas Air
3. Beban Pencemaran

Pengembangan modul Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup dilakukan untuk mendukung manajemen organisasi pemerintahan di lingkungan DLH Kota Cimahi serta dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan pelaksanaan ketentuan dalam PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan layanan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Manfaat – manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan penerapan e-government secara sistematis melalui penyediaan infrastruktur sistem berbasis elektronik.
- Kemudahan pemerintah dalam pelayanan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Kemudahan dalam pembuatan laporan-laporan dan penyajian data dan informasi untuk kebutuhan internal





No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Nilai Pij	Status Mutu Air	Detail	Tanggal	Aksi
1	cisangk	hilir	5,31	Sangat Buruk	*	2022-03-09	QR
2	cisangk	tengah	7,83	Sangat Buruk	*	2022-03-09	QR
3	cisangk	hulu	4,08	Sangat Buruk	*	2022-03-09	QR
4	cimahi	hilir	5,75	Sangat Buruk	*	2022-03-21	QR
5	cibureum	hilir	17,55	Sangat Buruk	*	2024-02-28	QR
6	cibureum	tengah	18,88	Sangat Buruk	*	2024-02-28	QR
7	cibureum	hulu	14,48	Sangat Buruk	*	2024-02-28	QR
8	cisangk	hilir	15,80	Sangat Buruk	*	2024-02-27	QR
9	cisangk	tengah	17,52	Sangat Buruk	*	2024-02-27	QR
10	cisangk	hulu	17,29	Sangat Buruk	*	2024-02-27	QR

Gambar 9 Dashboard SITANGAN

4.3 KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Lahan-lahan pertanian, hutan, dan ruang terbuka hijau kian hari kian menyusut akibat tekanan kebutuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Proses alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya sumber pangan lokal, serta terpinggirkannya komunitas adat.

Namun, di tengah gelombang tersebut, masyarakat hukum adat Cireundeu di Kota Cimahi, Jawa Barat, memberikan contoh bagaimana kearifan lokal dapat menjadi benteng pertahanan terhadap praktik alih fungsi lahan yang tidak berkelanjutan. Melalui nilai-nilai adat yang mereka pegang, masyarakat Cireundeu berhasil menjaga keberlangsungan lingkungan dan identitas budaya mereka.

Luas wilayah Kampung Cireundeu awalnya sekitar 64 hektar, dengan peruntukan seperti berikut ini:

1. Leuweung larangan, yang berarti hutan larangan. Luas leuweung larangan sekitar 3 hektar. Lokasinya berada di wilayah Gunung Gajah Langu dan di Gunung Puncak Salam. Di area tersebut ditanami pohon

- pinus dan pohon-pohon besar lainnya, seperti mahoni, albasiah, celeret, dan jati.
2. Leuweung tutupan (hutan reboisasi) yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi. Luas area leuweung tutupan sekitar 20 hektar. Pepohonan yang terdapat di dalam hutan tersebut dapat dimanfaatkan, dengan catatan harus disertai dengan penanaman kembali pohon yang baru.
 3. Leuweung baladahan (hutan pertanian) yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun oleh masyarakat Cireundeu. Lahan tersebut biasanya ditanami jagung, kacang tanah, pisang, singkong atau ketela, dan umbi-umbian. Luas lahan yang dipergunakan untuk tanaman singkong sekitar 25 Ha, untuk tanaman jagung 3 Ha, sedangkan tanaman kacang tanah dan ubi jalar biasanya dibudidayakan dengan sistem tumpang sari. Selain berkebun, masyarakat kampung adat Cireundeu juga berternak domba dan ayam dimana yang paling dominan adalah ternak domba yakni sekitar 380 ekor, sedangkan ternak ayam hanya sekitar 100 ekor hal ini karena ternak domba dapat digunakan untuk pemanfaatan limbah singkong berupa kulit singkong dan daun singkong sebagai makanannya.

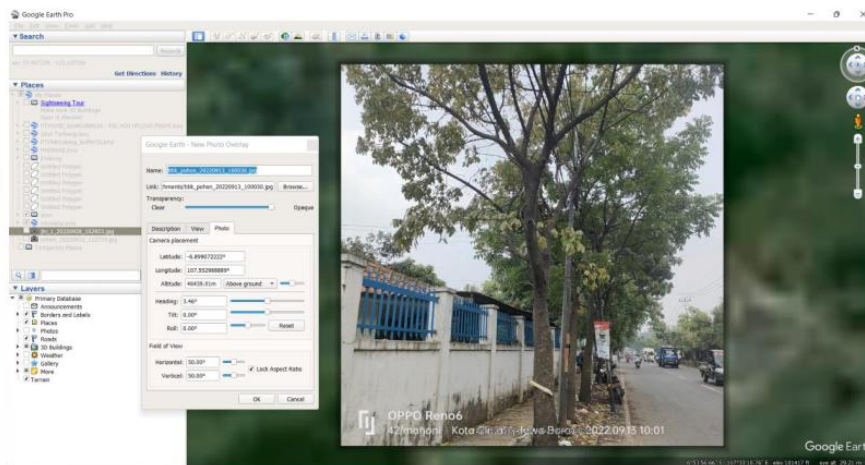




Gambar 10 Kampung Adat Cireundeu

4.4 SITANGKAL

Keberadaan RTH sangat penting dalam perencanaan tata ruang kota. Fungsi RTH pada umumnya adalah sebagai ruang untuk beraktivitas bagi masyarakat, dan juga untuk meningkatkan nilai estetika sebuah kawasan. Selain itu untuk menjamin keseimbangan ekosistem, baik hidrologis maupun iklim, serta dapat menurunkan suhu sehingga daerah sekitarnya terasa lebih sejuk. Penyebaran informasi geografis dapat berupa data spasial (wilayah) maupun data non spasial, berupa informasi yang berhubungan dengan keberadaan wilayah atau ruang, dalam hal ini adalah keberadaan kondisi pohon di RTH Jalur Hijau Kota Cimahi. Pembuatan Data Base Pohon Per Pohon Berbasis Sistem Informasi Geografis di Lingkungan Hidup Kota Cimahi, selain untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup organisasi lingkungan hidup, juga dalam upaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.



Gambar 11 Dashboard SITANGKAL

V. PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi adalah gambaran secara umum pengelolaan lingkungan hidup yang berisi informasi aktual dalam hal ini disampaikan dalam tahun 2024. Berdasarkan analisis isu lingkungan hidup dan isu prioritas yang telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

- Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Cimahi pada tahun 2025 adalah:
 1. Pengelolaan Sampah
 2. Kuantitas dan Kualitas Air
 3. Alih Fungsi dan Keterbatasan Lahan
 4. Kualitas Udara
- Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan hidup prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi, berupa:
 1. AWAS SI KOMA
 2. SITANGAN
 3. KAMPUNG ADAT CIREUNDEU
 4. SITANGKAL

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain:

- Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Cimahi.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah Kota Cimahi untuk mencapai nilai IKLH
- Melakukan berbagai pengembangan upaya pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah dari sumbernya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan sirkular ekonomi, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir dan mencapai target pengurangan-penanganan sampah sesuai Jakstrada Kota Cimahi.
- Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem informasi berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan pada masyarakat juga mengurangi emisi sektor transportasi.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkait pengawasan emisi dari sumber titik.
- Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan, terutama ruang terbuka yang memiliki indikasi jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari lahan terbuka melalui pengembangan agroforestri dan ekowisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar.